

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN**

(Studi Kasus di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

Tahun 2013-2019)

Oleh

ARIKA DEWI ALFIA

1765201004



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG**

RADEN RAHMAT

2021

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya
Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Kanigoro
Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Tahun 2013-2019)

Disusun oleh : Arika Dewi Alfia

NIM : 1765201004

Prodi : Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan
didepan tim penguji.
Malang, 23 Juli 2021

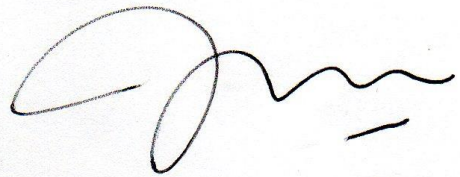
Mengetahui dan Menyetujui,

Kaprodi,



Sri Handayani, S.SosI., M.AP
NIDN. 0706118302

Pembimbing,



Mimin Anwartinna, S.IP., M.A.
NIDN. 0712059202

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

(Studi Kasus di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang
Tahun 2013-2019)

Dipersembahkan dan disusun oleh :

(Arika Dewi Alfia)
NIM. 1765201004

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan didepan tim penguji.

Malang, 23 Juli 2021

Tim Penguji,

Pembimbing,



Mimin Anwartinna, S.IP.,M.A.
NIDN. 0712059202

Ketua Penguji,



Mashur Hasan Bisri, M.AP.
NIDN. 0704097902

Anggota Penguji,



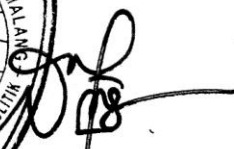
Sri Handayani, S.SosI., M.AP
NIDN. 0706118302

Malang, 23 Juli 2021

Mengesahkan,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dafis Ubaidillah Assiddiq, S.IP., M.IP
NIDN. 0702068301

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Arika Dewi Alfia

NIM : 1765201004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Tahun 2013-2019)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan termasuk karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda kutipan dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang.

Malang, 23 Juli 2021

Yang membuat pernyataan,



Arika Dewi Alfia
NIM. 1765201004

*Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang tua yang sangat kucintai dan
kusayangi Ibunda dan Ayahanda Tercinta*

Sebagai tanda bakti dan rasa terimakasih yang tiada terhingga,

*Kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu Siti Maslikah dan Bapak Sigit
Gunawan yang selalu memberikan dukungan, do'a dan cinta kasih untuk putrimu
ini yang tiada mungkin dapat kubalas dengan selebar kata persembahan ini.
Semoga ini menjadi langkah awal putrimu ini untuk membuat Ibu dan Bapak
bahagia.*

Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberi orang tua yang luar biasa

(11 Agustus 2021)

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

ABSTRAK

Arika Dewi Alfia, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Tahun 2021, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Tahun 2013-2019). Dosen Pembimbing : Mimin Anwartinna, S.IP.,M.A.

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH), program ini dicanangkan sejak tahun 2007. PKH sendiri masuk Kabupaten Malang sejak tahun 2013, salah satu penerima program ini adalah Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran. Penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Kanigoro dikarenakan jumlah penerima program ini terbanyak dari desa lainnya di Kecamatan Pagelaran serta dalam kurun waktu 2013-2019 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH yang keluar dari program sedikit dibanding dengan desa lainnya.

Implementasi PKH di Desa Kanigoro akan diteliti dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, yang melihat implementasi sebagai model proses politik dan administrasi. Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua faktor besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Dalam pelaksanaan program sudah berjalan sesuai dengan ketentuan, ada pendampingan penerima dari pendamping PKH yang diangkat oleh kementerian. Dilaksanakan pula kegiatan verifikasi dan *update* data komponen penerima PKH, serta adanya kegiatan kelompok. Namun penetapan KPM penerima bantuan PKH belum berjalan efektif, dikarenakan data yang digunakan data lama sehingga banyak bantuan yang tidak tepat sasaran. Tingkat respon dan kepatuhan dalam pelaksana PKH di Desa Kanigoro masih minim, kurangnya respon dari pendamping PKH serta stakeholder ditingkat atas dalam menangani kendala-kendala di lapangan.

Kata kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan, pendamping.

ABSTRACT

Arika Dewi Alfia, Department of Governmental Science, Faculty of Social and Political Science, Raden Rahmat Islamic University of Malang, 2021, The Implementation of *Program Keluarga Harapan* (PKH) in Poverty Alleviation (Case Study at the Kanigoro Village, Pagelaran Sub-district, Malang Regency at 2013-2019). Advisor: Mimin Anwartinna, S.IP.,M.A.

Poverty is a global issue faced by many countries, including Indonesia. One of governments' efforts to combat poverty in Indonesia is by conducting the *Program Keluarga Harapan* (PKH), a program designed since 2007. The PKH itself was introduced in the Regency of Malang in 2013, and one of the beneficiaries of this program is the Kanigoro Village, Pagelaran Sub-district. The writer was interested in conducting this research at the Kanigoro Village because it has the highest number of beneficiaries between other villages in the Sub-district of Pagelaran and within the period of 2013-2019, the beneficiary families (KPM) of PKH leaving the program were less compared to other villages.

The implementation of PKH at the Kanigoro Village was studied by using the implementation theory of Merilee S. Grindle, which refer implementation as the model of political and administrative process. According to Grindle, the success of implementation is influenced by two major factors, which are the policy content and the implementation environment.

The implementation of the program had corresponded to the regulations, with the availability of beneficiary accompaniment from the PKH companion, which was determined by the ministry. Activities such as verification and data update of the PKH beneficiary components were also performed, as well as group activities. Yet, the determination of beneficiary families of PKH was still ineffective due to the utilization of old data, which then mistargeted the goal. The level of response and obedience in the implementation of PKH was low as there was lack of responses from the PKH companion and the higher stakeholders in dealing with the obstacles in the field.

Keywords: Implementation, *Program Keluarga Harapan*, Companion.

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Tahun 2013-2019)**. Limpahan karunia dari-Nya tidak berhenti mengair sehingga skripsi ini selesai, banyak sekali pihak-pihak yang membantu, memberikan motivasi serta dorongan semangat sehingga peneliti terdorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan berjuta terima kasih kepada:

1. Bapak tercinta dan Ibu tersayang atas doa dan dorongan semangat disetiap langkah penulis;
2. Mimin Anwartinna, S.IP.,M.A. Dosen Pembimbing, beribu terima kasih saya ucapkan karena berkat bimbingan dan dorongan beliau saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, beliau tidak sungkan untuk jemput bola terhadap mahasiswanya sehingga saya merasa takjub dengan semangat beliau;
3. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang telah banyak menularkan ilmu dan pengalamannya kepada saya;
4. Seluruh pihak yang menjadi informan selama penelitian ini dilakukan;
5. Sahabat dan teman terbaikku. No'is Maroatus Sholiha, Labaika Wilda Fisabilillah, Dyah Dwi Kurniasari, Ludikasari, Ratna Sulistyaningrum terimakasih atas dukungan dan motivasi serta bantuan kalian. Meskipun sering terjadi perselisihan semoga kita tetap jadi teman yang kompak.
6. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2017, teman berbagi ilmu, berbagi semangat, berbagi cerita, Karminingsih, Ardhina Aiza Tsania, Anggun Vega Safitri, Achmad Khoiruddin Utomo, Moh. Hasyim, Dani Firdaus.

Malang, 12 Agustus 2021

Arika Dewi Alfia

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Tanda Persetujuan Skripsi.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Orisinalitas	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Bagan	xiv
Daftar Simbol dan Singkatan	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu.....	10
2.2 Konsep Kebijakan Publik.....	13
2.3 Implementasi Kebijakan.....	14
2.3.1 Implementasi Menurut George C. Edwards III.....	15
2.3.2 Implementasi Menurut Menurut Grindle	16
2.3.3 Implementasi Menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelii	23
2.3.4 PKH Desa Kanigoro Menurut Perspektif Grindle	23
2.4 Konsep Kemiskinan	24
2.5 Konsep Kesejahteraan.....	26

2.6 Alur Pikir.....	29
---------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Penelitian Kualitatif	31
3.2 Lokasi Penelitian.....	32
3.3 Fokus Penelitian.....	32
3.4 Pemilihan Informan.....	33
3.5 Data	34
3.5.1 Data Primer	35
3.5.2 Data Sekunder.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6.1 Wawancara.....	36
3.6.2 Studi Pustaka.....	37
3.7 Analisis Data	37
3.7.1 Kodifikasi Data	38
3.7.2 Penyajian Data	38
3.7.3 Kesimpulan	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian.....	40
a. Sejarah Desa.....	40
b. Aspek Geografi	41
c. Aspek Demografi	42
d. Aspek Sumber Daya Alam.....	46
e. Aspek Sumber Daya Manusia.....	47
f. Aspek Sumber Daya Pembangunan.....	47
g. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya	48
h. Wilayah Desa	49
i. Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	50
4.2 Hasil Penelitian	52
a. Latar belakang profesi informan	53
b. Menilik kegiatan informan.....	54
c. Pemanfaatan program oleh KPM	55

d. Keluhan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH	56
e. Adanya unsur politik	57
4.3 Pembahasan.....	58
a. Tujuan kebijakan dan realita	59
b. Sasaran kebutuhan warga.....	62
c. Kesadaran akan kesehatan balita dan pendidikan	65
d. Penetapan KPM.....	67
e. Pelaksanaan Program	74
f. Kombinasi Unsur Pelaksana PKH.....	77
g. Kedekatan Kepala Desa dengan Bupati	79
h. Karakteristik Pemerintahan Desa serta Pendamping PKH	82
i. Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana	83
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	88
Daftar Pustaka	89
Lampiran	92

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah KPM penerima bantuan PKH tahun 2013-2019.....	5
Tabel 1.2 Data Jumlah KPM yang keluar program karena mampu.....	7
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Informan yang dijadikan narasumber	34
Tabel 4.1 Masa Kepemimpinan Kepala Desa	41
Tabel 4.2 Perkembangan Kependudukan Tahun 2010-2015	43
Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Peserta KB dan PUS Tahun 2010-2015.....	44
Tabel 4.4 Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah	44
Tabel 4.5 Daftar Sumber Daya Alam di Desa Kanigoro	47
Tabel 4.6 Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Kanigoro.....	47
Tabel 4.7 Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Kanigoro.....	48
Tabel 4.8 Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Kanigoro	48
Tabel 4.9 Data Wilayah Administrasi di Desa Kanigoro.....	49
Tabel 4.10 Struktur Organisasi Pemerintah Desa	51
Tabel 4.11 Tingkat kehadiran balita di posyandu melati 6 Desa Kanigoro.....	66

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Implementasi sebagai proses politik dan administrasi	19
Gambar 2.2 Implementasi program menurut Cheema dan Rondinelii	23
Gambar 4.1 Peta Desa	42
Gambar 4.2 Komponen KPM PKH	63
Gambar 4.3 Alur penetapan KPM	72
Gambar 4.4 Kegiatan pertemuan dengan kelompok PKH	76
Gambar 4.5 Bukti kampanye	81
Gambar 4.6 Organisasi pengelola PKH Kabupaten Malang	82
Gambar 4.7 Verifikasi berkas pemeroleh PKH	84

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur piker penelitian	29
---------------------------------------	----

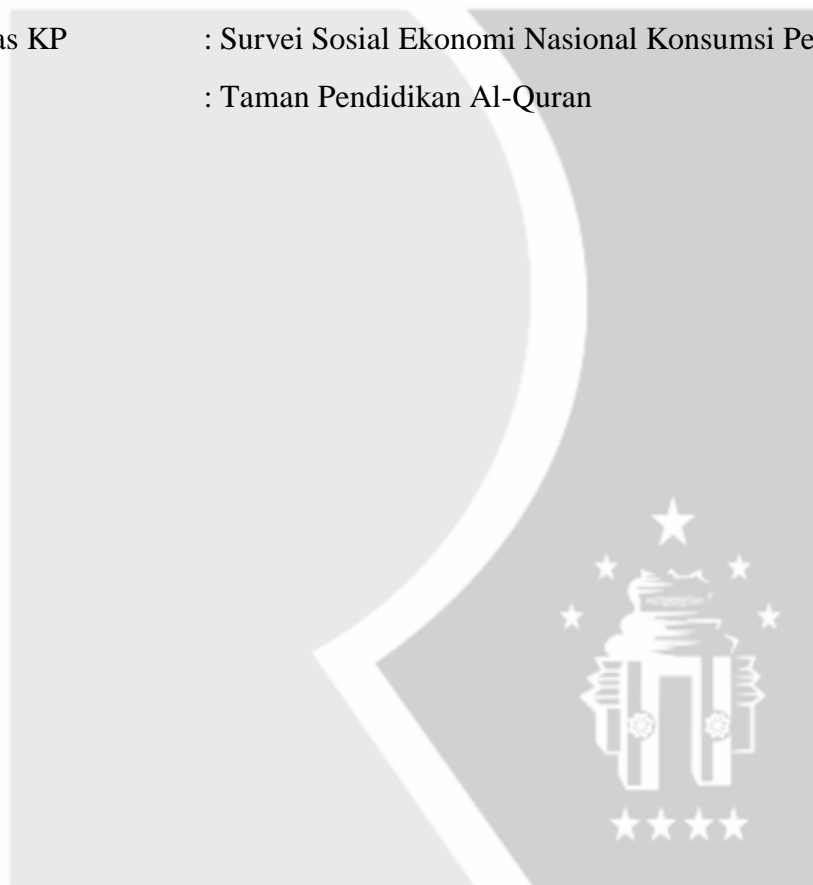


UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

DAFTAR SIMBOL DAN SINGKATAN

APD	: Apresiasi Pelaku Budaya
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPUM	: Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Menengah
CCT	: Conditional Cash Transfer
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
FGD	: Focus Grup Discussion
Himbara	: Himpunan Bank-Bank Milik Negara
KB	: Keluarga Berencana
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KIS	: Kartu Keluarga Sehat
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
KM	: Keluarga Miskin
KPM	: Kelompok Penerima Manfaat
KSM	: Keluarga Sangat Miskin
MDGs	: Millennium Development Goals
OTM	: Orang Tidak Mampu
PBDT	: Pemutakhiran Basis Data Terpadu
Pemda	: Pemerintah Daerah
PFM	: Penanganan Fakir Miskin
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKH	: Program Keluarga Harapan
PPLS	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
PSE	: Pendataan Sosial Ekonomi
PUS	: Pasangan Usia Subur
Pustadinkesos	: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia

RTHM	: Rumah Tangga Hampir Miskin
RTSM	: Rumah Tangga Sangat Miskin
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIKS-NG	: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation
SP2D	: Surat Perintah Pembayaran Dana
SPM	: Surat Perintah Membayar
Susenas KP	: Survei Sosial Ekonomi Nasional Konsumsi Pengeluaran
TPQ	: Taman Pendidikan Al-Quran



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan *Wordometers* mencatat, jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai 274,86 juta penduduk per 14 Desember 2020. Jumlah ini menjadikan Indonesia berada di peringkat keempat dengan populasi terbanyak di dunia. (databoks, 2020) Jumlah penduduk yang begitu banyak dan wilayah yang begitu luas serta terpisahkan oleh lautan tentu tidak lepas dari berbagai kendala dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tatkala membahas kesejahteraan umum, kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjadi permasalahan yang utama. Kemiskinan juga merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang perlu mendapatkan intervensi pada tataran nasional dan juga tataran daerah, baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota yang lebih spesifik. Artinya, kebijakan pengentasan kemiskinan yang disusun saat ini tidak lagi bersifat seragam namun perlu memperhatikan kondisi setiap dimensi penyebab kemiskinan suatu wilayah. Dengan sumber daya yang terbatas, penyelesaian dimensi kemiskinan perlu berfokus dan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat (Nanga, 2018). Namun yang terjadi program pengentasan kemiskinan di Indonesia masih bersifat nasional yang dicanangkan oleh pusat yang berlaku bagi seluruh wilayah.

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya adalah dengan melalui program pengentasan kemiskinan seperti diberlakukannya program berbasis perlindungan sosial yakni Jamkesmas, Raskin, BSM, PKH dan pemberdayaan usaha mikro yakni KUR. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. (www.pkh.kemensos.co.id)

Salah satu program perlindungan sosial yang masih diberlakukan sampai saat ini yakni PKH (Program Keluarga Harapan). Program ini sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Pemerintah Indonesia telah menggulirkan program PKH. Program ini berlanjut hingga era pemerintahan Presiden Jokowi, sebab program ini dinilai memiliki manfaat besar dalam mengangkat kesejahteraan rumah tangga sangat miskin di Indonesia. Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, PKH mempunyai kontribusi besar dalam pengentasan kemiskinan di negeri ini. Program tersebut mampu mengubah status keluarga sangat miskin (KSM) menjadi keluarga dengan tingkat ekonomi yang lebih baik (Republika, 2014).

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan kepada Keluarga Miskin (KM) yang

ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen kesehatan dengan kriteria ibu hamil/menyusui, anak berusia nol sampai dengan enam tahun. Komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMA/MTs atau sederajat, anak SMK /MA atau sederajat, dan anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016 terdapat penambahan komponen kesejahteraan sosial dengan kriteria lanjut usia diutamakan mulai dari 60 (enam puluh) tahun, dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. (www.kemensos.co.id)

Dalam skala nasional PKH diperuntukkan di seluruh wilayah Indonesia dengan catatan memenuhi syarat penerima PKH. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Termasuk wilayah pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, atau perbatasan antar negara.

Salah satu wilayah penerima program adalah Kabupaten Malang yakni sejak tahun 2013. Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduk di Kabupaten Malang pada tahun 2020 yaitu sebesar 2.654.448 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 892 jiwa/km² (SP, 2020). Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil Susenas KP (Survei Sosial

Ekonomi Nasional Konsumsi Pengeluaran) pada Maret 2018, jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Malang terdapat sekitar 268.490 jiwa atau setara dengan 10,37 persen dari total sekitar 2,6 juta jiwa.

Dengan data di atas bisa dilihat angka kemiskinan dari Tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan. Namun persentase kemiskinan Kabupaten Malang tergolong masih tinggi dengan persentasi 9,47%. Kabupaten Malang memegang urutan ke-23 dalam tingkat kemiskinan, dari total 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur. Meski persentase kemiskinan sudah lebih baik, jumlah penduduk miskin setara 9,47% ini masih cukup besar, yakni sebanyak 246.600 jiwa.

Salah satu contoh wilayah yang bisa kita amati adalah di Kecamatan Pagelaran. Kecamatan Pagelaran merupakan kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Malang. Kecamatan ini terdiri dari 10 desa, 24 dusun, 52 RW, dan 394 RT. Kesepuluh desa di kecamatan ini adalah Suwaru, Balarjo, Clumprit, Banjarejo, Kanigoro, Brongkal, Pagelaran, Sidorejo, Karangsono, Kademangan. Sampai akhir tahun 2013, wilayah Pagelaran didiami sebanyak kurang lebih 80.510 jiwa, yang terdiri dari 39.259 orang laki-laki, dan 41.251 orang perempuan. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. (<http://pagelaran.malangkab.go.id>)

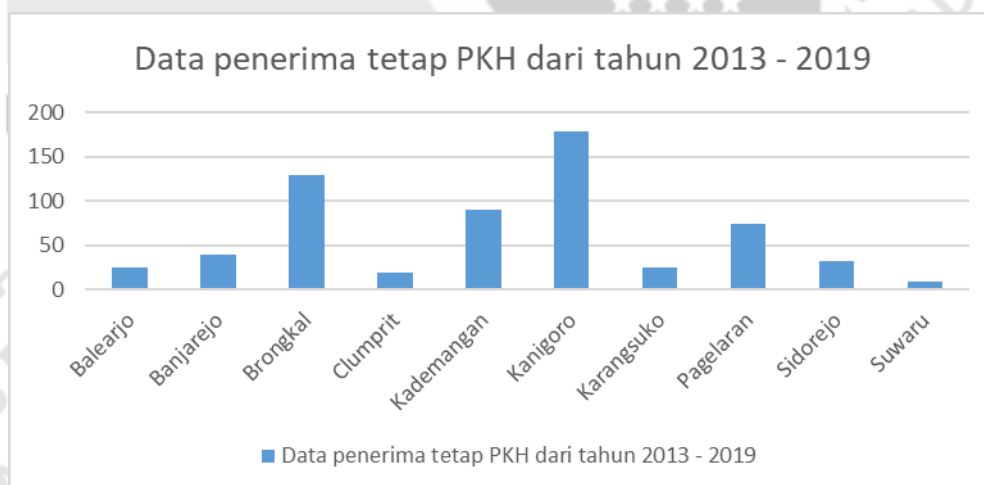
Diantara sepuluh desa di Kecamatan Pagelaran, Desa Kanigoro memiliki penduduk terbanyak diantara sepuluh desa lainnya. Luas wilayah Desa Kanigoro secara keseluruhan menurut BPS tahun 2019 adalah 771,80 ha dan merupakan desa terluas di Kecamatan Pagelaran. Jumlah penduduk di Desa Kanigoro pada tahun 2019 sebanyak 13.167 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk di Desa

Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, sumber daya manusia ditinjau dari tingkat pendidikan masyarakat lulusan sekolah dasar sederajat sekitar 1.000 orang, Lulusan SMP sederajat 1.500 orang, Lulusan SMU sederajat sekitar 2.000 orang, lulusan Akademi/D1-D3 sekitar 150 orang, lulusan sarjana sekitar 300 orang, dan sisanya pendidikan pondok pesantren. Sedangkan katagori Masyarakat miskin sekitar 1.500 kepala keluarga (Anam, Asroful dkk, 2020:162)

Dari sekian jumlah penduduk di Desa Kanigoro hanya 3,4% dari total penduduk yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, artinya masih banyak penduduk dengan keterbatasan pendidikan. Hal tersebut juga menjadikan sumber daya manusia yang rendah sehingga tingkat kemiskinan di Desa Kanigoro tertinggi dari pada desa lainnya dari seluruh desa di Kecamatan Pagelaran.

Menurut data pendamping PKH Desa Kanigoro, di Desa Kanigoro terdapat kurang lebih 527 Keluarga penerima manfaat PKH pada tahun anggaran 2019, data penerima bisa berkurang dan bisa bertambah setiap tiga bulan sekali sesuai *update* data.

Tabel 1.1 Jumlah KPM penerima bantuan PKH tahun 2013 -2019



Sumber : pendamping PKH Kec. Pagelaran

Data pada tabel 1.1 di atas bukan data jumlah penerima bantuan program PKH secara keseluruhan, namun data tersebut adalah data penerima yang terus-menerus menerima bantuan PKH dari tahun 2013-2019. Berdasarkan data tersebut diketahui pula bahwa jumlah penerima di Kanigoro terbanyak dari desa lainnya di Kecamatan Pagelaran sebesar 179 penerima yang jauh berbeda dengan desa lainnya. Jumlah penerima yang besar tersebut dikarenakan wilayah desa yang luas, yang terbagi menjadi tiga dusun yang jaraknya terpisahkan oleh sungai dan area persawahan. Hal ini menjadikan juga masyarakat Desa Kanigoro banyak yang bermata pencaharian sebagai buruh tani dan pekerja serabutan.

Data di atas menggambarkan pula bahwa penerima tiap tahun cenderung tetap, yang bisa di analisis karena penerima masih memenuhi tiga kategori bantuan PKH yakni, ada usia balita dalam keluarga, ada anak sekolah dan lansia. Bantuan ini sangat meringankan beban keluarga pada kategori masyarakat miskin. Disisi lain juga bisa kita kritisi bahwa dari tahun 2013-2019 terhitung enam tahun memperoleh bantuan seharusnya penerima program bisa menaikkan status sosialnya. Namun sayangnya keluarga penerima manfaat cenderung berpangku tangan dengan adanya program PKH.

Disamping data penerima bantuan tetap program PKH, menurut pendamping PKH juga terdapat data penerima yang keluar program bantuan karena sudah tidak memenuhi kriteria, antara lain penerima sudah dinyatakan dalam kategori mampu dalam ekonomi. Bisa kita amati bersama pada tabel 1.2 bahwa selama tahun 2017 hingga 2019 penerima bantuan di Desa Kanigoro yang keluar karena mampu sangat sedikit dibandingkan desa lainnya. Pada tahun 2019 prosentase yang keluar hanya 1,5% dari total penerima. Bisa jadi sedikitnya

jumlah yang keluar karena masyarakat menggantungkan bantuan, kurangnya pendekatan pendamping PKH serta masyarakat menganggap berhak menerima bantuan karena menganggap bantuan adalah dana dari pemerintah.

Tabel 1.2 Data Jumlah KPM yang keluar program karena mampu

Desa	Th 2017	Th 2018	Th 2019
BALEARJO	0	2	5
BANJAREJO	0	0	1
BRONGKAL	13	37	20
CLUMPRIT	0	2	5
KADEMANGAN	0	8	11
KANIGORO	1	1	6
KARANGSUKO	1	7	12
PAGELARAN	4	14	7
KANIGORO	1	1	1
SUWARU	1	3	1

Sumber : koordinator pendamping PKH Kec. Pagelaran

Dari uraian diatas, data penerima bantuan PKH di Desa Kanigoro pada tahun 2016-2019 tidak mengalami kemajuan untuk kategori kemiskinan. Warga seakan menjadi tengadah terhadap bantuan pemerintah. Bahkan, bantuan yang seyogyanya untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan justru ada warga penerima manfaat PKH yang bantuannya digunakan untuk keperluan lainnya yang bersifat skunder seperti kredit sepeda motor.

Ada fakta menarik dari sisi lain mengapa di desa Kanigoro jumlah penerima program lebih banyak dari desa lainnya. Hal ini berkaitan dengan nuansa politik, masyarakat Desa Kanigoro patuh terhadap intruksi Kepala Desa. Apabila Kepala Daerah yang sedang memimpin di usung oleh partai tertentu, Kepala Desa pun ikut ke partai tersebut dan mengintruksikan masyarakatnya untuk berpihak ke partai tersebut. Secara fisik desa juga akan berubah warna sesuai partai tersebut. Hal ini menjadikan desa Kanigoro lancar dalam bantuan-bantuan dan program pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk membuat judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Tahun 2013-2019)”, dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana implementasi program keluarga harapan yang telah dilaksanakan di Desa Kanigoro Kecamatan Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi program PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Tahun 2013-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi program PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi dalam bidang sosial dan politik serta di harapkan dapat menjadi tambahan litelatur ilmu pengetahuan dan bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkan.

b. Bagi pemerintah

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam hal pengambilan kebijakan yang menyangkut peningkatan peran pemerintah dalam membantu mengentaskan kemiskinan yang ada dimasyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

c. Bagi masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat bahwasanya PKH dapat membantu mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan.